



JIGE 5 (3) (2024) 1880-1891

JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION

ejournal.nusantaraglobal.or.id/index.php/jige

DOI: <https://doi.org/10.55681/jige.v5i3.3272>

SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI: POLA HUBUNGAN MASYARAKAT LINTAS AGAMA DALAM MEWUJUDKAN HARMONISASI DI KOTA PEMATANGSIANTAR

Riky Fransiskus Simarmata^{1*}, Izak Yohan Matriks Lattu¹

¹ Magister Sosiologi Agama, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

*Corresponding author email: 752022033@student.uksw.edu

Article Info

Article history:

Received Agustus 01, 2024
Approved September 04, Year

Keywords:

Sapangambei *Manoktok*
Hitei, *Public* *Relations*,
Harmonization

ABSTRACT

Sapangambei Manoktok Hitei is a philosophy of the Simalungun tribe which means mutual cooperation or working together for a noble cause. This philosophy has been a city slogan in Pematangsiantar for almost 150 years. This paper aims to analyze interfaith community relations on the slogan Sapangambei Manoktok Hitei in Pematangsiantar City, especially to people who have begun to be polarized by ethnicity and religion as a force in the modern era. The pattern of community relations is the basis of the social process, which points to the existence of a dynamic pattern of relationships. Community activities become a reference in the pattern of interfaith relations. This paper uses Blumer's (1969) symbolic interactionism theory approach to see the meaning (which is interpreted by the community regarding symbols, and is complemented by Izak Lattu (2023)) to see the extent to which the interpreted symbol is a living text in society. This paper uses qualitative-descriptive methods with literature study. The results of the paper show that symbols are an effort in establishing interfaith community relations patterns. The imagination of the Sapangambeii Manoktok Hitei symbol that can develop can be used by the community as a preventive imagination in destructive reality.

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Simarmata, R. F & Izak Yohan Matriks Lattu, I. Y. M (2024). SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI: POLA HUBUNGAN MASYARAKAT LINTAS AGAMA DALAM MEWUJUDKAN HARMONISASI DI KOTA PEMATANGSIANTAR. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(3), 1880–1891. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i3.3272>

PENDAHULUAN

Etnik Simalungun merupakan suhut (tuan rumah) di wilayah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar, sehingga sudah sepatutnya semua etnik yang mendiami wilayah ini menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai luhur Simalungun yang termaktub dalam moto *Sapangambe Manoktok Hitei* guna membangun kehidupan multikulturalisme yang harmoni.

Secara harfiah, *Sapangambe Manoktok Hitei* dapat diartikan, “Bersama-sama (bergotong royong/bahu membahu) membangun jembatan”, merupakan nilai luhur Simalungun yang sudah sejak lama bertumbuh, berkembang dan digunakan sebagai falsafah hidup masyarakat kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar. Memiliki makna tentang kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong menolong dan sosialisasi. (Simarmata et al., 2021:9) Secara geografis Kota Pematangsiantar terletak sangat strategis sebagai sebuah kota persinggahan bagi banyak orang sehingga menjadikan kota ini menjadi kota yang sangat majemuk dan multikulturalis.

Kemajemukan masyarakat Pematangsiantar jika dilihat dari latar belakang suku bangsa, sosial dan budaya, bahasa, dan juga agama adalah merupakan kenyataan yang tidak dapat dielakkan. Realita atas perbedaan tersebut menjadikan kita sebagai masyarakat yang kaya dan unik dari masyarakat yang lain, disamping itu kesemuanya merupakan potensi konflik jika berjalan secara sinergi. Pluralitas di Pematangsiantar dapat dikatakan sebagai suatu persoalan strategis. Dikatakan sebagai persoalan strategis karena integrasi masyarakat menjadi dasar bagi terwujudnya rasa persatuan dan kesatuan masyarakat yang merupakan prasyarat terciptanya stabilitas daerah yang sangat diperlukan bagi kelancaran pengembangan daerah.

Kota Pematangsiantar pada saat ini sedang dalam proses membangun harmonisasi dengan banyak faktor yakni faktor ekonomi, faktor politik, faktor lainnya. Namun pembangunan Kota Pematangsiantar pada saat ini bukan hanya berfokus pada faktor struktural saja, melainkan juga faktor non struktural yaitu agama, berupa motivasi dan dorongan dari masyarakat agama. Dorongan atau dukungan dari umat beragama terhadap pembangunan ialah menciptakan suasana rukun damai atau suasana yang harmonis antar umat beragama.

Terwujudnya suasana yang harmonis tersebut, sehingga segala macam bentuk hasil pembangunan dapat dinikmati dan tidak dirusak oleh berbagai kerusuhan antar umat beragama. Hal ini sering terjadi di Indonesia bahkan di Kota Pematangsiantar sendiri pada belakangan ini, yakni kerusuhan bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan), terlebih lagi kerusuhan atas nama agama, maka segala macam fasilitas umum yang dibangun untuk kepentingan masyarakat turut pula menjadi “korban”.

Berdasarkan kasus-kasus yang belakangan ini sering terjadi menjadikan agama menjadi perhatian penting didalam diskusi publik. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa agama seringkali menjadi benteng utama dan pengikat kekuatan sosial bagi masyarakat ketika bertikai antara satu dengan lainnya. Walaupun belum tentu pemicu pertikaian adalah agama, akan tetapi agama menjadikannya lebih rumit lewat penggunaan bahasa religius (*vocabulary religion*) serta simbol-simbol yang digunakan pada saat pertikaian terjadi. Dengan demikian relasi yang konfrontatif antar orang-orang yang berbeda agama di dunia sekarang ini merupakan salah satu fakta yang paling patut disayangkan (Idrus Ruslan, 2017).

Pematangsiantar adalah sebuah kota dan letaknya di Provinsi Sumatera Utara yang kemudian dikelilingi oleh Kabupaten Simalungun. Kota ini terbagi atas banyak suku dan agama sehingga membuat kota ini menjadi kota yang majemuk dan heterogenitas tinggi. Letak kota yang strategis menjadikan kota ini sebagai akses jalan raya lintas Sumatera. Kota ini memiliki luas

wilayah 79,97 km² dan berpenduduk sebanyak 268.254 jiwa pada tahun 2021 (“Data Jumlah Penduduk”, 2021). Pada tahun 2015 kota ini tercatat sebagai kota paling toleran di Indonesia, namun pada tahun 2018 turun ke peringkat dua dan pada tahun 2020 sesuai dengan data yang diperoleh dari Setara Institut (Riana, Friski dan Wibowo, 2021) bahwa kota ini sudah tidak menjadi kota toleransi lagi dikarenakan adanya temuan yang dilakukan oleh pihak Setara Institut yang mencoreng nilai-nilai toleransi di Indonesia, yakni pemulasaran jenazah covid yang jenazah seorang perempuan dimandikan oleh petugas laki-laki dan ini membuat para organisasi-organisasi keagamaan geram sehingga mengancam tindakan tersebut dengan cara berkumpul di lapangan kota dengan membawa atribut-atribut keagamaan serta menuntut pemerintah agar menindaklanjuti kasus tersebut dengan dalih penistaan agama. Sejak kejadian tersebut terjadilah penguatan organisasi keagamaan sehingga membuat pola hubungan masyarakat semakin tersekat oleh atribut keagamaan.

Sebenarnya permasalahan ini hanyalah sebuah permasalahan yang tidak perlu diperdebatkan secara panjang, namun dengan masuknya agama yang dianggap sebagai media yang dapat menyelesaikan masalah menjadikan permasalahan tersebut menjadi panjang. Agama menjadi magnet untuk menarik simpati masyarakat sehingga membentuk pola hubungan yang tidak baik di dalam interaksi sosial masyarakat kota Pematangsiantar. Pemerintah bahkan tidak mampu meredam tindakan tersebut dikarenakan dorongan massa menuntut untuk ketegasan dalam kasus tersebut.

Perdamaian dan kerukunan yang didambakan oleh setiap agama bukanlah sesuatu yang semu, tetapi yang memberi rasa aman pada jiwa setiap manusia. Namun untuk mewujudkan hal tersebut sangat sulit untuk saat ini dikarenakan adanya tekanan daripada agama-agama yang menganggap dirinya sebagai mayor dan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama mayor akan ditolak dan ditentang dengan dalih akan merugikan mereka sebagai masyarakat mayor. Lattu di dalam tulisannya Menggugat Majoritarianisme mengungkapkan bahwa kemunculan majoritarian turn atau tendensi perasaan bahwa mayoritas berhak menjadi narasi tunggal dan menentukan arah politik bangsa dan hal ini menciderai nilai-nilai demokrasi di Indonesia (Lattu, 2022). Pematangsiantar memiliki beberapa agama seperti Islam, Kristen, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu, namun semenjak terjadi polemik agama di kota tersebut menjadikan para penganut mayoritas yakni agama Islam semakin membuat terjadinya penguatan-penguatan nilai keagamaan bahkan sampai ke dalam pemerintahan.

Sebenarnya permasalahan ini hanyalah sebuah permasalahan yang tidak perlu diperdebatkan secara panjang, namun dengan masuknya agama yang dianggap sebagai media yang dapat menyelesaikan masalah menjadikan permasalahan tersebut menjadi panjang. Agama menjadi magnet untuk menarik simpati masyarakat sehingga membentuk pola hubungan yang tidak baik di dalam interaksi sosial masyarakat kota Pematangsiantar. Pemerintah bahkan tidak mampu meredam tindakan tersebut dikarenakan dorongan massa menuntut untuk ketegasan dalam kasus tersebut.

Penelitian terdahulu tentang simbol dan harmonisasi sosial pernah tertuang didalam dalam tulisan Saragih yang melihat dinamika identitas etnis Simalungun di lingkungan Pemerintahan Pematangsiantar.(Saragih, 2018). Tulisan Aswin menganalisis pendekatan pola hubungan masyarakat kota Medan dengan pendekatan kebudayaan Dalihan Na Tolu.(Lubis, et al., 2019). Sementara tulisan Salam yang berjudul: “Kudus Purbakala dalam Perjuangan Islam”, mengungkap artefak sebagai simbol fisik multikulturalisme yang terus direproduksi secara sosial.

Tulisan Serly Touwly mengenai Sirih Pinang sebagai simbol pemersatu bangsa, berbicara mengenai simbol integrasi dalam kehidupan keluarga. (Touwely et al., 2020).

Membedakan tulisan yang telah ada, tulisan ini mengungkap konsep dari slogan *Sapangambei Manoktok Hitei* yang artinya gotong royong atau bekerja sama demi tujuan mulia untuk perwujudan pola hubungan masyarakat lintas agama di Kota Pematangsiantar yang sudah tidak harmonis semenjak merosotnya IKT (Indeks Kota Toleran) yang dari peringkat 1 bahkan sudah terlempar dari 10 besar. Slogan *Sapangambei Manoktok Hitei* diharapkan dapat menginspirasi dan dijadikan sebagai model penyelesaian konflik antar etnis dan agama, atau yang diperlukan dalam upaya pengelolaan konflik antar etnis dan agama di Pematangsiantar saat ini dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan dalam masyarakat. Dalam upaya penyelesaian konflik di Indonesia khususnya di Pematangsiantar hendaknya dilakukan pendekatan-pendekatan kebudayaan seperti *Sapangambei Manoktok Hitei* sebagai memori bagi masyarakat untuk tetap bersatu didalam melawan segala tindakan intoleransi yang saat ini sangat marak, sehingga memunculkan konflik berkepanjangan di masyarakat.

METODOLOGI

Tulisan ini menggunakan metodologi Kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dan studi pustaka. Metodologi penelitian kualitatif berfungsi untuk membantu peneliti mengeksplorasi dan memahami makna *Sapangambei Manoktok Hitei* secara tulisan. Falsafah ini perlu diteliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena penulis melihat bahwa makna falsafah tersebut harus digali secara dalam makna sesungguhnya baik melalui sejarah tulisan, episteme, dan fungsi sesungguhnya didalam masyarakat. (John, 1994). Pendekatan deskriptif menjadi pisau analisis dari tulisan ini guna menemukan makna sesungguhnya dari masalah yang terjadi serta studi pustaka sebagai teknik analisis guna menambah literatur dalam penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. *Sapangambei Manoktok Hitei* Sebagai Sejarah Yang Dilupakan

Kota Pematangsiantar, sebagaimana yang penulis pahami sudah banyak mengalami proses sejarah panjang. Ketika kita berjalan-jalan atau berekreasi ke kota tersebut kita tidak akan pernah menemukan tulisan motto kota tersebut yaitu *Sapangambei Manoktok Hitei*, namun yang ditemui hanyalah sebuah logo kota Pematangsiantar, tanpa tulisan motto. Pertanyaan paling mendasar di dalam benak penulis yaitu mengapa demikian? Padahal jika dilihat kota maupun kabupaten tertentu akan memiliki motto didalam logo kota maupun kabupaten. Apakah para pemimpin pemerintahan yakni eksekutif, yudikatif dan legislatif tidak menyadari hal itu? Atau jangan-jangan mereka menerima masukan namun tidak menghiraukannya sama sekali. Atau siapakah orang yang berkompeten untuk mengubah itu? Pertanyaan itu akan selalu melintas di benak orang-orang yang akan melintasi kota tersebut. (Simarmata et al., 2021:17)

Sebagai bandingan akan kesejarahan Simalungun, bahwa pada awalnya Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun adalah satu yaitu didiami oleh suku Simalungun. Dari kondisi ini tentunya kedua wilayah ini adalah memiliki kebudayaan yang sama yaitu kebudayaan simalungun. Tentunya kita dapat menyebutnya sebagai abang dan adik. Kabupaten Simalungun yang tertua, dan adiknya Kota Pematangsiantar. Kalau demikian bahwa Kabupaten Simalungun memiliki motto *Habonaron do Bona*, sesungguhnya jika di Kota Pematangsiantar memiliki motto *Sapangambei Manoktok Hitei*, itu adalah kelanjutannya.

Bahwa Habonaron do Bona, *Sapangambei Manoktok Hitei* adalah suatu pengertian, yaitu kebenaran pangkal utama, dan satu orang membangun jembatan semua orang dapat menggunakannya. Motto kota Pematangsiantar adalah *Sapangambei Manoktok Hitei*, yang maknanya adalah “bergotong royong atau bekerja sama” (Fitri, 2018). Jadi bisa dikatakan prinsip saling bekerjasama di dalam adat istiadat Simalungun sudah ada sejak jaman dahulu kala. *Sapangambei Manoktok Hitei* secara sederhana bisa diartikan “bekerjasama untuk mencapai tujuan yang hakiki” untuk kepentingan semua masyarakat dalam mencapai kemakmuran. Prinsip bekerjasama atau bergotong royong ini dilakukan oleh masyarakat Simalungun untuk mencapai rasa keadilan, kebahagiaan dan cinta kasih.

Selain kata gotong royong “gotong royong” mencerminkan spirit ‘kesadaran diri’, ‘keharmonisan derap langkah’, sikap komunal yang saling asah, asuh dan asih; dalam masyarakat Simalungun, warisan sikap, kearifan leluhur Simalungun dalam menata, menghidupi hubungan ideal dalam bermasyarakat, sebuah sifat dan karakter masyarakat komunal “Hutan Adat”, kampung adat dahulunya yang memiliki sifat ciri; bergotong royong, selalu mengedepankan sikap gotong royong karena inilah inti tujuan sebuah Hutan Adat. Sikap gotong royong ini dipertegas lagi dengan adanya sebuah tinjauan yang mulia, bermakna keselarasan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal, kesetaraan, keadilan, kebahagiaan, cinta dan kasih.

Implikasi *Sapangambei Manoktok Hitei* adalah adanya tradisi prinsip gotong royong ataupun bekerja sama yang begitu kental yang disebut dengan Haroan Bolon. Haroan Bolon digambarkan dengan bekerja bersama-sama pada saat mulai merencanakan menanam padi, dilakukan pembagian tugas, dipanggil semua unsur kerabat yang patut untuk berunding, laksanakan doa meminta kesuksesan kerja dan harapan hasil padi nantinya, makan bersama, pada saat panen, kembali diundang kerabat yang patut, laksanakan kerja panen, sampaikan doa ucapan syukur sesuai alam kepercayaan dan sebagian hasil panen sampaikan kepada kerabat yang dihormati. Dengan kegiatan ini maka pekerjaan yang terasa berat akan menjadi ringan karena dikerjakan secara bersama-sama demi kemajuan masyarakat (Simarmata et al., 2021:27).

Bagaimana pemerintah Kota Pematangsiantar mengaplikasikan motto *Sapangambei Manoktok Hitei*, dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor kehidupan? Prinsip ini sepertinya sudah dilupakan atau bahkan tidak dipahami lagi pada saat ini dalam proses pengambilan kebijakan di Kota Pematangsiantar. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan dari program-program pembangunan yang tidak mengakar dari masyarakat dalam hal ini etnis Simalungun. Akibat adanya yang terlupakan, berakibat ketersinggungan, berakibat munculnya protes, dan jika berlanjut dapat menciptakan disharmoni vertikal, jika demikian terjadi stagnan.

Filosofi Simalungun mengatakan sadani riah do parsautni horja, parasut ni horja do pardasarni sura-sura, artinya musyawarah adalah awal terjadinya sebuah pekerjaan, jika kerja terjadi maka cita-cita pun terjadi.

Hirasma dalam Damanik, mengatakan bahwa Simalungun mengenal filosofi Habonaron do Bona yang menjadi pedoman hidup sehari-hari. Habonaron do Bona mempunyai wawasan yang luas dan penuh dengan: kasih sayang, suka cita, damai sejahtera, kesabaran, kelembahlembutan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, pengendalian diri.(Simarmata et al., 2021:44) Habonaron Do Bona bukan hanya awalnya saja yang benar, tetapi harus benar di tengah, dan di akhir.

Kabupaten Simalungun selalu mencantumkan mottonya: Habonaron do Bona dalam lambang Kabupaten Simalungun, dimana dapat dilihat dalam plakat setiap OPD Kabupaten Simalungun, dan Kop Surat Resmi Pemerintah Kabupaten Simalungun, tidak seperti Kota Pematangsiantar yang tidak mencantumkan fotonya di dalam plakat OPD dan Kop Surat resminya.

B. Sejarah Pemisahan Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun

Kota pematangsiantar, sebagaimana yang dihuni oleh banyak masyarakat majemuk pada saat ini telah mengalami sejarah yang sangat panjang. Kota ini adalah bagian dari awal suku Simalungun, yaitu kerajaan Siantar. Dalam tata pemerintahan awal Simalungun setiap kerajaan memiliki wilayah pusat kerajaan, dimana raja mengendalikan wilayah kekuasaannya, yang disebut Pematang. Pematang (bahasa Simalungun) artinya ibu kota atau kerajaan. Dengan demikian bahwa Siantar merupakan sebuah kerajaan dan juga sekaligus ibu kota kerajaan, maka dalam hal penulisan adalah terpisah yaitu Pematang Siantar. Kerajaan Siantar ibukotanya adalah Pematang Siantar.

Pada tahun 1945 wilayah Simalungun pemerintahan dilaksanakan oleh 7 (tujuh kerajaan) yaitu: (1) Kerajaan Siantar, dengan ibukotanya Pematang Siantar; (2) Kerajaan Tanah Jawa, ibukotanya Pematang Tanah Jawa; (3) Kerajaan Pane, ibukotanya Pematang Panei; (4) Kerajaan Raya, ibukotanya Pematang Raya; (5) Kerajaan Dolog Silou, ibukotanya Pematang Dolok Silou; (6) Kerajaan Purba, ibukotanya Pematang Purba; (7) Kerajaan Silimakuta, ibukotanya Pematang Silimakuta. Jelas bahwa setiap kerajaan memiliki Pematang. Sebagai gambaran bahwa ibu kota Kabupaten Simalungun yang saat ini berada di Kecamatan Raya tepatnya itu adalah Kota Pematang Raya, dimana dulunya adalah ibu kota dari Kerajaan Raya. Penulisannya adalah Pematang Raya.

Pematangsiantar berkedudukan di Pulo Holing, yang merupakan pusat pemerintahan kerajaan, dengan raja yang memerintah adalah dinasti marga damanik, diantara raja dan dinasti damanik yang terkenal adalah Tuan Sangnawaluh Damanik yang memegang kekuasaan sebagai raja tahun 1888-1913, dan beliau merupakan raja yang ke-14 dalam dinasti Kerajaan Siantar. Raja ini diperkirakan lahir pada tahun 1871 di rumah bolon (Simalungun) Istana Raja Siantar di Pematang (Dasuha, 2012:44).

Kawasan Pulo Holing kemudian berkembang menjadi perkampungan penduduk diantaranya Kampung Suhi Haluan, Siantar Bayu, Sushi Kahean, Pantoa, Sushi Bah Besar, dan Tomuan. Daerah-daerah tersebut kemudian membentuk kawasan sehingga terbentuk Kota pematangsiantar seperti:

1. Pulo Holing menjadi Kampung Pematang.
2. Siantar Bayu menjadi Kampung Pusat Kota.
3. Suhi Kahean menjadi kampung sipinggol-pinggol, kampung Melayu, Martoba, Sukadame dan Bane.
4. Sushi Bah Bosar menjadi Kampung Kristen, Karo, Tomuan, Pantoan, Toba dan Martimbang.

Ketika Belanda memasuki daerah Simalungun, dan berhasil menaklukkan para raja di Simalungun dengan menandatangani Korte Verklaring (pernyataan pendek) tahun 1907, sehingga model pemerintahan kolonial masuk dan menempatkan raja sebagai bagian dari sistem pemerintahan Kolonial dengan Landschap. Dalam system ini, raja tetap menjalankan kekuasaannya sebagai pemimpin kerajaan, dan untuk membantu pengelolaan administrasi pemerintahan kerajaan diangkat jabatan Pangulu Bale (semacam sekretaris daerah).

Controleur Belanda yang semula berkedudukan di Perdagangan, pada tahun 1907 dipindahkan ke Pematangsiantar. Dampak pemindahan ini maka Pematangsiantar berubah menjadi daerah migrant dari berbagai suku bangsa seperti bangsa Cina mendiami kawasan Timbang Galung dan Kampung Melayu. Orang dari Tapanuli (Toba) mendiami kampung Kristen,

orang Mandailing mendiami kawasan Sipinggol-pinggol dan sebagainya. Sementara orang Simalungun berada tinggal di kawasan Pamatang.

Pada 1910 didirikan Badan Persiapan Kota Pematangsiantar, pada tanggal 1 Juli 1917 berdasarkan Stad Blad No. 285 Pematangsiantar Berubah menjadi Gemeente yang mempunyai otonomi sendiri (Tideman, 1922). Sejak Januari 1939 berdasarkan Stad Blad No. 717 berubah menjadi Siantar State dan dewan dihapus. Setelah Proklamasi kemerdekaan Pematangsiantar kembali menjadi Daerah Otonomi. Berdasarkan Undang-undang No. 22/1948. Status Gemeente menjadi Kota Kabupaten Simalungun dan Walikota dirangkap oleh Bupati Simalungun sampai tahun 1957.

Berdasarkan UU No. 1/1957 berubah menjadi Kota Paraj Penuh dan dengan keluarnya Undang-Undang No.18/1965 berubah menjadi Kota, dan dengan keluarnya Undang-Undang No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah berubah menjadi Kota daerah Tingkat II Pematangsiantar sampai sekarang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 1981 Kota Daerah Tingkat II Pematangsiantar terbagi atas empat wilayah kecamatan yang terdiri atas 29 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah 12,48 Km² yang peresmiannya dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 17 Maret 1982. Kecamatan tersebut meliputi: (1) Kecamatan Siantar Barat; (2) Kecamatan siantar Timur; (3) Kecamatan Siantar Utara; (4) Kecamatan Siantar Marihat; (5) Kecamatan Siantar Selatan).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1986 tanggal 10 Maret 1986 Kota Daerah Tingkat II Pematangsiantar diperluas menjadi wilayah kecamatan dimana 9 Desa/Kelurahan dari wilayah Kabupaten Simalungun masuk menjadi wilayah Kota Pematangsiantar, sehingga Kota Pematangsiantar terdiri dari 38 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah menjadi 70,230 km.Kecamatan tersebut meliputi: (1) Kecamatan Siantar Barat; (2) Kecamatan Siantar Timur; (3) Kecamatan Siantar Utara; (4) Kecamatan; (5) Kecamatan Siantar Marihat; dan (6) Kecamatan Siantar Martoba.

Selanjutnya, pada tanggal 23 Mei 1994 dikeluarkan kesepakatan bersama penyesuaian batas wilayah Administrasi antara Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun dengan SKB Bersama No. 136/4620/1994/136/3140/1994. Adapun hasil kesepakatan tersebut adalah wilayah kota Pematangsiantar menjadi seluar 79,9706 km, pada tahun 1997 wilayah administrasi di kota Pematangsiantar mengalami perubahan status sesuai dengan SK yang meliputi:

1. SK Gubsu No. 140.050.K/97 tertanggal 13 Februari 1997 dan direalisasikan oleh SK Walikota KDH Tk II Kota Pematangsiantar No.140/1961/Pem/97 tertanggal 15 April 1997 tentang Pembentukan Lima Kelurahan Persiapan di Kecamatan Siantar Martoba.
2. SK Gubsu No.140/2610. K/95 tertanggal 4 Oktober 1995 serta direalisasikan oleh SK Walikota KDH Tk II Kota Pematangsiantar No.140/1961/ Pem/97 tertanggal 2 Juli 1997 tentang perubahan status 9 (sembilan) desa menjadi Kelurahan. Sehingga pada tahun 1997 wilayah administrasi Kota Pematangsiantar menjadi 43 Kelurahan.

Pada tahun 2007, diterbitkan lima peraturan daerah tentang pemekaran wilayah administrasi Kota Pematangsiantar yaitu:

1. Peraturan Daerah No. 3 tahun 2007 tentang pembentukan Kecamatan Siantar Sitalasari
2. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2007 tentang pembentukan Kecamatan Siantar Marimbun
3. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2007 tentang pembentukan Kelurahan Bah Sorma Siantar Selatan

Dengan demikian secara administrasi wilayah kota Pematangsiantar terbagi dalam 8 (delapan) kecamatan yaitu: (1) Kecamatan Siantar Marihat; (2) Kecamatan Siantar Marimbun; (3) Kecamatan Siantar Selatan; (4) Kecamatan Siantar Barat; (5) Kecamatan Siantar Utara; (6) Kecamatan Siantar Timur; (7) Kecamatan Siantar Martoba; (8) Kecamatan Siantar Sitalasari. (Simarmata et al., 2021:25).

C. *Sapangambe* *Manoktok Hitei* Sebagai Perwujudan Harmonisasi

Teori Interaksionisme Simbolik diperkenalkan oleh beberapa sosiologi, yaitu John Dewey, Charles Horton Cooley, George Mead dan Herbert Blumer. Keempat tokoh ini melihat interaksionisme simbolik dari perspektif sosial. Dasar dari teori Interaksionisme Simbolik adalah teori behaviorisme sosial, yang memusatkan diri pada interaksi alami yang terjadi antara individu dalam masyarakat dan masyarakat dengan individu. Interaksi antar individu berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan.

Interaksionisme Simbolik menurut Herbert Blumer. Blumer dipengaruhi oleh Mead dalam gagasan mengenai interaksionisme sosialnya tetapi ia mempunyai gagasan sendiri. Gagasan-gagasan Blumer menjadi premis atau dasar untuk menarik kesimpulan. Premis Blumer, yaitu; (1) manusia bertindak atas sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka; (2) makna itu diperoleh dari interaksionisme sosial yang dilakukan dengan orang lain; (3) makna-makna tersebut disempurnakan dalam interaksionisme sosial yang sedang berlangsung. (Herbert, 1969)

Bagi Blumer masyarakat tidak berdiri statis, stagnan, serta semata-mata didasari oleh struktur makro. Esensi masyarakat harus ditemukan pada diri aktor dan tindakannya. Masyarakat adalah orang-orang yang bertindak (actor). Kehidupan masyarakat terdiri dari tindakan mereka. Masyarakat adalah tindakan dan kehidupan kelompok merupakan aktivitas kompleks yang terus berlangsung. Tindakan yang dilakukan oleh individu itu tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga merupakan tindakan bersama, atau Mead disebut tindakan social (Theresia, 2017).

Senada dengan Izak Y.M Lattu, mengutip dalam karangan bukunya teologi tanpa tinta menyatakan bahwa pada suatu komunitas masyarakat terdapat pengetahuan, memori, melalui cerita lisan lewat simbol (tanda) sebagai interaksi simbolik masyarakat. (Izak Y.M. Lattu, 2020) *Sapangambe* *Manoktok Hitei* adalah sebuah simbol yang didapat melalui pengetahuan lokal masyarakat atas memori sejarah panjang terbentuknya kota Pematangsiantar. Jadi sudah layak sebenarnya simbol ini dikaji ulang untuk perwujudan pola hubungan masyarakat lintas agama di kota Pematangsiantar agar selalu harmonis di tengah konflik yang memanas saat ini khususnya mengenai konflik agama.

Pada tulisan ini penulis men dialektika teori simbol dan komunikasi budaya dengan melihat sejauh mana falsafah *Sapangambe* *Manoktok Hitei* mampu membentuk pola hubungan harmonis bagi masyarakat lintas agama yang ada di Kota Pematangsiantar. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa *Sapangambe* *Manoktok Hitei* mempunyai makna sebagai kegiatan “bergotong royong atau kerjasama”. Jadi bisa dikatakan prinsip saling bekerjasama di dalam adat istiadat Simalungun sudah ada sejak jaman dahulu kala. *Sapangambe* *Manoktok Hitei* secara sederhana dapat diartikan “bekerjasama untuk mencapai tujuan yang hakiki” untuk kepentingan semua masyarakat dalam mencapai kemakmuran. Prinsip kerjasama atau bergotong royong ini dilakukan oleh masyarakat Simalungun untuk mencapai rasa keadilan, kebahagiaan dan cinta kasih (Saragih, 2020).

Simbol *Sapangambe* *Manoktok Hitei* adalah sebuah simbol filosofis bagi masyarakat Pematangsiantar, makna yang terkandung mampu menjadi spirit untuk merekonstruksi paham-

paham berbeda diantara masyarakat. Menurut Arisandi, karakter dasar dari interaksionisme simbolik adalah hubungan yang terjadi secara alami antara manusia di dalam masyarakat dan juga masyarakat dengan individu. (Ranubaya & Endi, 2023) Interaksi antar individu tersebut mengalami perkembangan melalui simbol-simbol yang telah diciptakan bersama, dengan secara tidak langsung simbol *Sapangambe Manoktok Hitei* telah memainkan perannya dahulu di tengah-tengah masyarakat Pematangsiantar.

Interaksionisme Simbolik memiliki beberapa konsep dasar sesuai dengan perspektif Blumer. Pertama, masyarakat terdiri dari individu-individu yang saling berinteraksi dan terlibat dalam kegiatan bersama untuk membentuk struktur sosial. Kedua, interaksi antar individu melibatkan berbagai aktivitas, di mana interaksi non-simbolis mencakup stimulus-respons, sementara interaksi simbolik mencakup interpretasi tindakan. Ketiga, makna tidak melekat pada objek, tetapi merupakan hasil dari interaksi simbolik. Objek dapat dikategorikan menjadi fisik, sosial, dan abstrak, dan manusia juga memandang dirinya sebagai objek. Keempat, tindakan manusia adalah hasil interpretasi oleh individu. Kelima, tindakan-tindakan tersebut saling bergantung dan disesuaikan oleh anggota kelompok dalam proses yang disebut "tindakan bersama". Akhirnya, tindakan bersama yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kondisi stabil akan membentuk budaya (Hisarma, 2014).

Pernyataan Blumer diatas secara tidak langsung menjadikan simbol sebenarnya adalah sebuah makna hidup yang dilakukan secara berulang-ulang didalam hidup masyarakat. Namun kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan secara benar di dalam hidup masyarakat Pematangsiantar pada saat ini. kemajemukan, pluralitas dan multikultural menjadikan masyarakat hidup dengan kemauannya sendiri, secara khusus pluralitas agama membentuk sekat antar masyarakat sehingga menimbulkan disintegrasi dan disharmonisasi. Agama pada dasarnya adalah baik, namun menjadi tidak baik ketika beberapa oknum menjadikan agama sebagai simbol di ruang publik dalam membentuk sekat bagi masyarakat yang masih harmonis.

Fanatisme agama adalah akar dari permasalahan harmonisasi yang terjadi pada saat ini di kota Pematangsiantar. Orang fanatik kadang-kadang sangat mengagumkan dalam menjalankan ibadah. Mereka sangat aktif dan setia, serta tekun dalam mendalami kitab suci. Dalam bersaksi, mereka selalu konsisten, dan dalam memberi persembahan, mereka sangat dermawan. Namun, tindakan orang-orang fanatik sering mengejutkan kita, karena mereka bisa tiba-tiba berubah menjadi garang, menuduh, dan menghukum orang yang tidak setuju dengan pendapat mereka. Dampak lain dari fanatisme adalah ketidakmampuan menerima pandangan yang berbeda dan memaksakan keyakinan mereka kepada orang lain. Hal ini menjadi masalah karena setiap orang yang tidak sesuai dengan pandangan mereka akan disalahkan, menimbulkan konflik bagi beberapa pihak. (Lesmana & Syafiq, 2022) Identitas yang melekat dalam diri seseorang akan menjadi senjata dalam melindungi dirinya dari keberagaman yang ada pada saat ini, contoh kecilnya saja adalah agama. Identitas yang serupa akan membentuk solidaritas sendiri-sendiri sehingga mengabaikan harmoni sosial sebagai bentuk solidaritas terkuat dalam interaksi sehari-hari. Ketidak seimbangan dalam melihat momentum permasalahan agama akan menimbulkan konflik berkepanjangan seperti yang terjadi di banyak daerah pada saat ini (Idi, 2012).

Simbol adalah salah satu alat yang saat ini masih mungkin untuk di kembangkan dalam mengurai kembali memori kolektif masyarakat dalam merajut harmonisasi masyarakat lintas agama yang pada saat ini menjadi masalah di tengah hidup masyarakat khususnya masyarakat Pematangsiantar. Pancasila sebagai simbol pemersatu multikultural bangsa adalah salah satu

contoh nyata yang digunakan oleh pemerintah sebagai medium integrasi bangsa (Lukmanul Hakim, 2022).

Izak Lattu dalam bukunya "Rethinking Interreligious Dialogue" (Memikirkan Kembali Dialog Antaragama) hubungan yang terbentuk melalui interaksi sehari-hari adalah elemen kunci dalam membangun solidaritas kolektif masyarakat. Interaksi masyarakat hanya akan terbentuk ketika masyarakat itu memiliki kesamaan dalam pemahaman memori mereka, salah satu memori kolektif tersebut adalah simbol teks masyarakat *Sapangambe Manoktok Hitei* yang akan ditransmisikan melalui komunikasi untuk membentuk harmonisasi bagi masyarakat lintas agama. Tulisan Lattu dalam teorinya berfungsi menganalisis keterlibatan antar agama dalam keseharian yang berlandaskan falsafah sebagai simbolik, kelisanan serta praktik berbasis jejaring budaya untuk membangun relasi agama dengan baik (Izak Y.M. Lattu, 2023).

Blumer menyatakan bahwa interaksionisme simbolik berpijak pada tiga prinsip fundamental; pertama individu mengambil tindakan terutama berdasarkan makna yang mereka anggap berasal dari sesuatu, dengan memahami pengertian ini *Sapangambe Manoktok Hitei* sebagai makna filosofis dalam bertindak sebagai bagian dari kolektivitas masyarakat Pematangsiantar. Kedua, makna-makna tersebut dikonstruksi melalui interaksi sosial dengan orang lain, pengertian ini bermaksud agar simbol *Sapangambe Manoktok Hitei* dikonstruksi dalam paham dan pemikiran masyarakat, setelah itu hasil dari konstruksi makna tersebut dilakukanlah interaksi agar memudahkan menjalin komunikasi di tengah pluralitas lintas agama. Ketiga, makna-makna tersebut terus menerus disempurnakan melalui proses interaksi sosial yang tiada henti, pengertian ini bermaksud agar simbol, *Sapangambe Manoktok Hitei* dijadikan sebagai simbol utama dalam interaksi sosial masyarakat. Contohnya dengan cara menjadikan ini sebagai jargon atau motto kota yang terselip di dalam logo kota agar memudahkan masyarakat untuk mengingat simbol ini sebagai cara untuk mengintegrasikan masyarakat saat ini telah terdisintegrasikan. Melakukan sosialisasi melalui dinas pariwisata dan kebudayaan dapat meredakan setidaknya perpecahan yang terjadi akibat konflik internal dan eksternal khususnya agama, agar pola hubungan masyarakat lintas agama menjadi harmonis guna mengembalikan martabat kota toleran yang telah dicabut sebelumnya.

Menggunakan simbol-simbol dalam merajut kembali harmonisasi yang telah rusak, akan memberikan makna dan menggeser paradigma berpikir yang telah terpatok di dalam pikiran masyarakat tentang paham harmonisasi itu sendiri. Proses pergeseran makna itu sendiri akan dilakukan melalui proses interaksi masyarakat, dengan tujuan membentuk pemaknaan yang baru yang disepakati secara bersama di tengah masyarakat (Siregar, 2016).

KESIMPULAN

Pola hubungan lintas agama adalah sebuah hal yang sangat sulit untuk dibangun pada saat ini, sehingga perlu ada penengah dalam mendialogkan kembali sebuah perbedaan ini yakni dengan menjadikan simbol sebagai perwujudan harmonisasi. Kota Pematangsiantar akan kembali menjadi kota toleran jika simbol *Sapangambe Manoktok Hitei* dijadikan sebagai pembangun memori kolektif masyarakat dalam interaksi sosial masyarakat. *Sapangambe Manoktok Hitei* tidak hanya sebuah historis filosofis yang sering dianggap tidak penting, melainkan sebuah memori kolektif dalam mengintegrasikan masyarakat Pematangsiantar yang plural, majemuk dan multikultural. Peranan pemerintah dianggap sangat penting demi perwujudan harmonisasi ini agar pola hubungan masyarakat lintas agama berjalan tentram, aman dan damai. Dengan berpijak pada prinsip Blumer dalam interaksionisme simbolik menjadikan masyarakat Pematangsiantar dalam melakukan interaksi sosial dan tindakan sosial selalu mengacu kepada sebuah makna Simbol

Sapangambe Manoktok Hitei dan Teori Lattu mengenai memori kolektif masyarakat mengenai simbol khususnya simbol Sapangambe Manoktok Hitei artinya relasi agama akan berjalan secara harmonis seturut dengan keinginan semua orang tanpa harus melihat kembali konflik yang sudah terjadi pada masa lampau. Dengan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh rekan saudara yang ikut andil dalam membantu penulis menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

REFERENSI

- Dasuha. (2012). *Sejarah Perlawanan Sang Nauuluh Damanik Menentang Kolonialisme Belanda di Simalungun*.
- Data Jumlah Penduduk*. (2021).
- Fitri, H. (2018). *Hitei Symbols Interpreted as Simalungun Ethnic Identity in Regional Autonomy*. 138 (IcoCSPA 2017), 94–96.
- H, A. (2014). *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi dari Klasik Sampai Modern*. IRCiSoD.
- Herbet, B. (1969). *Symbolic Interactionism Perspective and Method*. University of California Press.
- Hubungan, P., & Lintas, M. (2017). *LAMPUNG SELATAN Idrus Ruslan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Abstrak A. Pendahuluan Fakta kemajemukan masyarakat Indonesia jika dilihat dari latar belakang suku bangsa , sosial budaya , bahasa dan juga agama adalah merupakan kenyataan yang t. 12(2), 129–144*.
- Idi, A. (2012). Harmoni Sosial: Interaksi Sosial “ Natural-Asimilatif ” antara Etnis Muslim Cina dan Melayu-Bangka. *Thaqafiyat*, 13(2), 362–383.
- Izak Y.M. Lattu. (2020). “Teologi tanpa Tinta: Mencari Logos melalui Etnografi dan Folklore.” *Membangun Gereja Sebagai Gerakan Yang Cerdas Dan Solider* (F. Purwanto, Agustinus, & T. E. Warsono (Eds.)). Sanata Dharma University Press.
- Izak Y.M. Lattu. (2023). *Rethinking Interreligious Dialogue: Orality, Collective Memory, and Christian-Muslim Engagements in Indonesia*. BRILL.
- John, C. (1994). *Research Design: Qualitative & quantitative approach*. Thousand Oaks.
- Lattu, I. (2022). Menggugat Majoritarianisme, Menegaskan Covenantal Pluralism Indonesia. *Menggugat Majoritarianisme, Menegaskan Covenantal Pluralism Indonesia*, 1.
- Lesmana, R. P. D., & Syafiq, M. (2022). Fanatisme Agama dan Intoleransi pada Pengguna Media Sosial. *Character : Jurnal Penelitian Psikologi*, 9(3), 36–49.
- Lubis, M. N., Joebagio, H., & Pelu, M. (2019). Dalihan Na Tolu Sebagai Kontrol Sosial Dalam Kemajuan Teknologi. *Sejarah Dan Budaya Jurnal Sejarah Budaya Dan Pengajarannya*, 13(1), 25–33. <https://doi.org/10.17977/um020v13i12019p025>
- Lukmanul Hakim, A. (2022). Eksistensi Pancasila Sebagai Simbol Pemersatu Multikultural Bangsa. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 223–230.
- Ranubaya, F. A., & Endi, Y. (2023). Analisis Privasi Dan Publikasi Postingan Media Sosial Di Kalangan Orang Muda Menurut Interaksionisme Simbolik Herbert Blumer. *Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(2), 133–144. <https://doi.org/10.37329/metta.v3i2.2455>
- Riana, Friski dan Wibowo, K. (2021). ‘Setara Institut : Pematangsiantar Terhempas dari Daftar Kota Paling Toleran’. *Tempo Co.Id*.
- Saragih, H. (2018). DINAMIKA IDENTITAS ETNIS SIMALUNGUN DAN PEMBANGUNAN DI KOTA PEMATANG SIANTAR. *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesenjaraan*, Volume V(No. 2).

- Saragih, H. (2020). *Patunggang adat Simalungun: Penyusunan dan Penyempurnaan Buku Adat Simalungun*. Yayasan Kita Menulis.
- Simarmata, M., Hasugian, J., Pudamo, M., Pasaribu, J., Saragih, H., Napitu, U., Sinurat, A., Manik, R., Purba, R., Munte, T., Nainggolan, A., & Damanik, J. (2021). *Quo Vadis ' Sapangambe Manoktok Hitei?' Patunggang Moto Pematangsiantar* (M. Simarmata & J. Simarmata (Eds.); I). Yayasan Kita Menulis.
- Siregar, N. S. S. (2016). Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik. *Perspektif*, 1(2), 100–110. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i2.86>
- Theresia, D. (2017). Interaksionisme Simbolik dalam Kehidupan Bermasyarakat. *SAPA Jurnal Kinetik Dan Pastoral*, 12(01). Hubungan, P., & Lintas, M. (2017). *LAMPUNG SELATAN Idrus Ruslan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Abstrak A . Pendahuluan Fakta kemajemukan masyarakat Indonesia jika dilihat dari latar belakang suku bangsa , sosial budaya , bahasa dan juga agama adalah merupakan kenyataan yang t. 12(2), 129–144.*
- Idi, A. (2012). Harmoni Sosial: Interaksi Sosial “ Natural-Asimilatif ” antara Etnis Muslim Cina dan Melayu-Bangka. *Thaqafiyat*, 13(2), 362–383.
- Lubis, M. N., Joebagio, H., & Pelu, M. (2019). Dalihan Na Tolu Sebagai Kontrol Sosial Dalam Kemajuan Teknologi. *Sejarah Dan Budaya Jurnal Sejarah Budaya Dan Pengajarannya*, 13(1), 25–33. <https://doi.org/10.17977/um020v13i12019p025>
- Lukmanul Hakim, A. (2022). Eksistensi Pancasila Sebagai Simbol Pemersatu Multikultural Bangsa. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 223–230.
- Siregar, N. S. S. (2016). Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik. *Perspektif*, 1(2), 100–110. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i2.86>
- Touwely, S., Kakiay, A. C., & Makulua, K. (2020). Sirih Pinang Sebagai Simbol Pemersatu Keluarga (suatu kajian pemaknaan budaya sirih pinang dalam konteks masyarakat Riring, Kecamatan Taniwel). *NOUMENA: Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan*, 1(1), 12–27.